BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian masyarakat Indonesia pada Oktober 2025 terfokus pada dugaan insiden kebocoran data yang menyeret institusi strategis negara, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Kasus ini mencuat setelah Bjorka mengklaim telah memperoleh dan membocorkan data internal Polri melalui platform *online*. Tempo.co memberitakan bahwa data yang diduga bocor mencakup data pribadi sekitar 341 ribu personel Polri (Tempo.co, 2025). Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran luas karena menyangkut institusi penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Selain berpotensi membuka informasi sensitif, kasus ini juga memunculkan pertanyaan publik mengenai ketahanan sistem keamanan informasi lembaga negara serta kesiapan mekanisme perlindungan data pada institusi publik (Siti Maesaroh, 2025).

Isu kebocoran data pada lembaga penegak hukum memiliki dimensi yang kompleks karena dapat berdampak pada keamanan personel, efektivitas kerja institusi, serta persepsi publik terhadap kredibilitas dan profesionalitas Polri. Dalam konteks komunikasi publik, situasi semacam ini juga menunjukkan pentingnya peran media *online* sebagai sumber informasi yang diakses masyarakat. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai kasus tersebut tidak hanya menyampaikan fakta peristiwa, tetapi juga dapat memberikan penekanan pada aspek tertentu. Misalnya, pada besaran data yang diduga bocor, respons aparat, atau tingkat ancaman yang

ditimbulkan. Penekanan tersebut menjadi penting karena dapat memengaruhi cara publik memahami masalah, melihat pihak yang dianggap bertanggung jawab, serta menilai urgensi penanganan yang diperlukan (Sukmawan & Setyawan, 2023).

Gambar 1.1 Kebocoran Data 341 Ribu Personel Polri

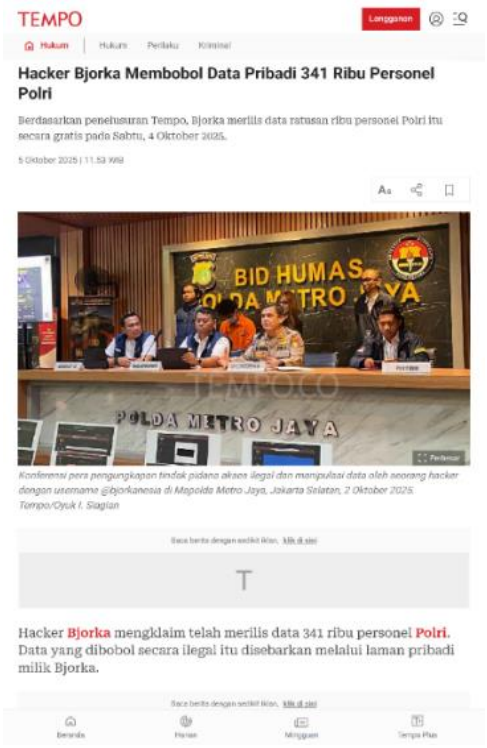

(Sumber: https://www.tempo.co/hukum/hacker-bjorka-membobol-data-pribadi-341-ribu-personel-polri-2076447, diakses pada 5 Januari 2026)

Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum, Polri secara normatif diharapkan mampu menerapkan sistem keamanan informasi serta pengelolaan data yang andal dan terstruktur. Oleh karena itu, dugaan kebocoran data ini tidak hanya dipahami sebagai gangguan teknis terhadap sistem digital, tetapi juga berimplikasi pada dimensi kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam melindungi data strategis. Dalam masyarakat yang semakin

bergantung pada layanan berbasis internet, keamanan data pada institusi publik menjadi bagian penting dari stabilitas institusional dan legitimasi lembaga negara (Indra Mulya *et al*., 2025).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem administrasi serta pengelolaan data di Indonesia. Penerapan digitalisasi pada layanan publik dan pemanfaatan infrastruktur berbasis internet oleh lembaga negara pada dasarnya memberikan peningkatan efisiensi dalam proses pengelolaan informasi. Namun demikian, kondisi tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya kerentanan terhadap ancaman keamanan siber. Dalam beberapa tahun terakhir, serangan siber yang menyasar sistem berbasis internet di Indonesia tercatat memiliki tingkat intensitas yang tinggi serta mengalami pola yang fluktuatif (Alfi, 2023). Fenomena ini memperlihatkan bahwa dugaan insiden kebocoran data, termasuk yang terjadi pada institusi negara, tidak dapat dipandang sebagai kasus yang terpisah, melainkan merupakan bagian dari dinamika ancaman siber yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Bahkan, laporan ancaman digital Indonesia tahun 2025 menunjukkan adanya akumulasi 133.439.209 serangan siber sepanjang periode Januari hingga Juni 2025 (AwanPintar.id, 2025).

Tingginya angka serangan tersebut menunjukkan bahwa risiko terhadap sistem informasi, termasuk yang dikelola oleh institusi publik, tetap berada pada tingkat yang tinggi dan berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebocoran data pada lembaga strategis seperti Polri tidak hanya menandai persoalan keamanan teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data pada institusi negara. Oleh karena itu, dugaan kebocoran data

Polri pada Oktober 2025 dapat ditempatkan sebagai bagian dari fenomena keamanan siber yang lebih luas dalam konteks nasional, sekaligus memperlihatkan urgensi evaluasi terhadap kapasitas institusi publik dalam menghadapi dan merespons ancaman siber.

Gambar 1.2 Akumulasi Serangan Siber di Indonesia Tahun 2025

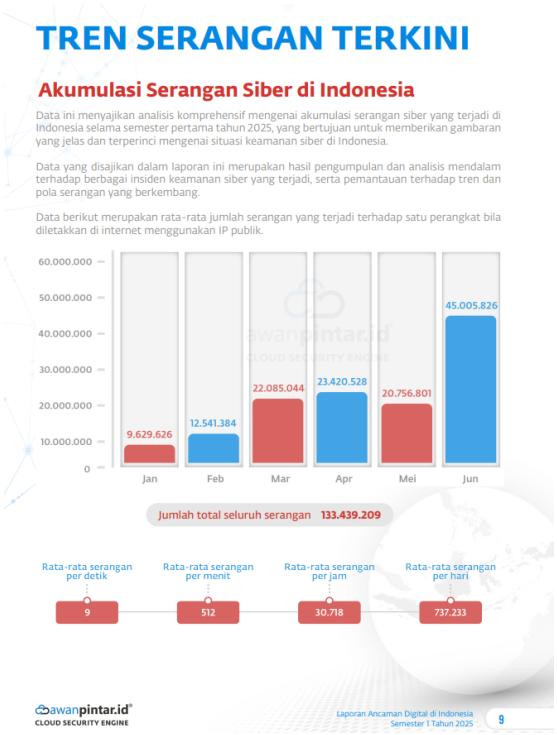

(Sumber: awanpintar.id, diakses pada 5 Januari 2026)

Dalam perspektif komunikasi publik, kondisi tersebut menegaskan pentingnya keberadaan media *online* sebagai rujukan informasi bagi masyarakat. Isu dugaan kebocoran data Polri yang dihubungkan dengan Bjorka kemudian memperoleh perhatian luas dan diberitakan secara intensif oleh sejumlah media *online* nasional, termasuk Tempo.co. Melalui pemberitaannya, Tempo.co menyajikan klaim yang berkembang di ruang publik, menguraikan jenis data yang diduga mengalami kebocoran, serta menampilkan tanggapan resmi dari aparat kepolisian melalui

konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Dalam pernyataan tersebut, pihak kepolisian menyampaikan bahwa penyelidikan sedang dilakukan terhadap dugaan akses ilegal dan manipulasi data. Dengan demikian, konstruksi berita, pemilihan judul, serta penempatan kutipan narasumber memiliki potensi untuk membentuk pemahaman publik terhadap peristiwa tersebut, terutama dalam menilai tingkat ancaman, posisi institusi Polri, dan figur Bjorka dalam narasi media (Indra Mulya *et al*., 2025). Dalam praktik pemberitaan media, penonjolan pada aspek-aspek tertentu perlu dikaji karena berpotensi membentuk cara masyarakat memahami suatu persoalan, mengidentifikasi pihak yang dianggap sebagai penyebab, serta menilai tingkat urgensi penanganan yang diperlukan. Dalam ranah kajian komunikasi, kecenderungan penekanan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan analisis *framing*.

Dalam perspektif yang lebih luas, kasus dugaan kebocoran data Polri oleh Bjorka tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari persoalan keamanan siber pada institusi pemerintahan. Kebocoran data pada lembaga negara merupakan ancaman serius karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran keamanan informasi dan privasi, tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan publik, tata kelola, dan keamanan nasional (Hamid & Huda, 2025). Dengan demikian, dugaan kebocoran data Polri pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa kerentanan keamanan informasi pada institusi pemerintah masih menjadi persoalan penting yang memerlukan perhatian serius, baik dari sisi perlindungan data maupun dari sisi kesiapan institusi dalam merespons ancaman digital. Dalam pemberitaan media, penekanan terhadap aspek

tertentu menjadi penting untuk dikaji karena dapat memengaruhi cara publik memahami masalah, melihat pihak yang diposisikan sebagai penyebab, serta menilai urgensi penanganan yang dianggap perlu. Dalam kajian komunikasi, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menelaah kecenderungan penekanan dalam pemberitaan media adalah analisis *framing*.

Konsep *framing* menjelaskan bahwa media memilih elemen-elemen tertentu untuk ditampilkan secara lebih menonjol sehingga membentuk cara pandang khalayak terhadap isu yang diberitakan. Dengan kata lain, peristiwa yang sama dapat disajikan dengan penekanan yang berbeda bergantung pada bagaimana media mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, membangun penilaian moral, dan merekomendasikan penyelesaian. Model *framin*g Robert N. Entman memetakan proses tersebut melalui empat elemen utama, yaitu *define problems, diagnose causes, make moral judgment,* dan *treatment recommendation* (Entman, 1993). Keempat elemen ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi secara sistematis bagaimana suatu isu diposisikan sebagai persoalan publik, siapa yang ditampilkan sebagai aktor penyebab, bagaimana implikasi normatif dibangun, serta solusi apa yang ditonjolkan dalam teks pemberitaan (Baliata Gunther *et al*., 2024).

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, kajian *framing* dalam isu keamanan siber di Indonesia masih cenderung berfokus pada kebocoran data secara umum, Pusat Data Nasional, sektor perbankan, aplikasi layanan publik, atau dilakukan secara komparatif lintas media. Namun, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana Tempo.co membingkai dugaan kebocoran data Polri oleh Bjorka dalam periode krisis Oktober 2025 dengan

menggunakan model *framing* Robert N. Entman. Padahal, kasus kebocoran yang menyasar institusi penegak hukum memiliki implikasi yang berbeda dari sektor lain karena berkaitan langsung dengan legitimasi negara, rasa aman publik, dan kepercayaan terhadap otoritas keamanan. Dengan demikian, celah penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menelaah *framing* media terhadap kerentanan institusi penegak hukum dalam konteks ancaman siber melalui analisis pada satu media dan satu periode krisis tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis *framing* Tempo.co terhadap kasus dugaan kebocoran data Polri oleh Bjorka pada Oktober 2025.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menetapkan Tempo.co sebagai objek kajian karena karakteristik pemberitaannya yang cenderung analitis, kritis, dan berakar pada tradisi jurnalisme investigatif. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana Tempo.co membingkai kasus kebocoran data Polri oleh Bjorka pada Oktober 2025 melalui pendekatan model *framing* Robert N. Entman. Penelitian ini berjudul "Analisis *Framing* Tempo.co terhadap Kasus Kebocoran Data Polri oleh Bjorka (Oktober 2025)".

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana media *online* Tempo.co membingkai pemberitaan mengenai kasus kebocoran data Polri oleh *hacker* Bjorka pada Oktober 2025. Analisis dilakukan dengan menggunakan model *framing* Robert N. Entman yang mencakup empat elemen utama, yaitu *define problems* atau pendefinisian masalah,

diagnose causes atau penentuan penyebab masalah, *make moral judgment* atau pembentukan penilaian moral, dan *treatment recommendation* atau perumusan rekomendasi penanganan dalam teks pemberitaan.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Untuk mengarahkan proses penelitian secara sistematis, pertanyaan penelitian utama tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tempo.co mendefinisikan masalah *(define problems)* dalam pemberitaan kasus kebocoran data Polri oleh *hacker* Bjorka pada Oktober 2025?
2. Bagaimana Tempo.co mengidentifikasi penyebab masalah *(diagnose causes)* dalam pemberitaan kasus kebocoran data Polri oleh *hacker* Bjorka pada Oktober 2025?
3. Bagaimana Tempo.co membangun penilaian moral *(make moral judgment)* terhadap aktor dan peristiwa dalam pemberitaan kasus kebocoran data Polri oleh *hacker* Bjorka pada Oktober 2025?
4. Bagaimana Tempo.co merekomendasikan penyelesaian masalah *(treatment recommendation)* dalam pemberitaan kasus kebocoran data Polri oleh *hacker* Bjorka pada Oktober 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Tempo.co membingkai pemberitaan kasus kebocoran data Polri oleh *hacker* Bjorka pada

Oktober 2025 dengan menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Tempo.co mendefinisikan masalah (*define problems*) dalam pemberitaan kasus kebocoran data Polri oleh *hacker* Bjorka pada Oktober 2025.
2. Menganalisis bagaimana Tempo.co mengidentifikasi penyebab masalah (*diagnose causes*) dalam pemberitaan kasus kebocoran data Polri oleh *hacker* Bjorka pada Oktober 2025.
3. Menjelaskan bagaimana Tempo.co membangun penilaian moral (*make moral judgment*) terhadap aktor dan peristiwa dalam pemberitaan kasus kebocoran data Polri oleh *hacker* Bjorka pada Oktober 2025.
4. Menginterpretasikan bagaimana Tempo.co merekomendasikan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) dalam pemberitaan kasus kebocoran data Polri oleh *hacker* Bjorka pada Oktober 2025.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian analisis *framing* media *online*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan praktis bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberitaan isu keamanan siber dan kebocoran data.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya jurnalisme digital dan analisis

framing. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana media membentuk dan menonjolkan makna pemberitaan melalui proses seleksi isu, penekanan informasi, serta penyusunan narasi dalam teks berita. Penelitian ini juga memperkaya perspektif akademik terkait penggunaan model analisis *framing* Robert N. Entman dalam konteks isu keamanan digital dan kebocoran data lembaga pemerintah. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkuat landasan konseptual mengenai bagaimana media memproduksi makna, membentuk opini publik, serta menjalankan fungsi representasionalnya dalam isu-isu sensitif yang melibatkan institusi negara. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan studi komunikasi dengan memberikan gambaran empiris mengenai praktik *framing* di media *online* Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara media, kekuasaan, dan peristiwa digital kontemporer.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Program Studi Ilmu Komunikasi

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik dalam kajian analisis *framing* media, khususnya pada isu keamanan siber, kebocoran data, dan pemberitaan media *online*. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memahami bagaimana media membentuk realitas sosial melalui teks berita.

2. PT. Tempo Inti Media Tbk

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam praktik pemberitaan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara sikap kritis,

akurasi, kehati-hatian, dan proporsionalitas saat memberitakan isu sensitif seperti kebocoran data yang melibatkan institusi negara.

3. Polri dan Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Polri dan pemerintah dalam memahami pentingnya tata kelola keamanan digital, perlindungan data, serta komunikasi publik yang transparan ketika menghadapi isu kebocoran data pada institusi negara.

4. Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi media sehingga pembaca lebih kritis dalam memahami bahwa pemberitaan tidak sepenuhnya netral, melainkan melalui proses seleksi dan pembingkaian tertentu. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam menafsirkan informasi yang beredar di media *online*.